



## **Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo**

### ***The Participative Empowerment of Indonesian Former Migrant Worker for Unemployment Reduction in Karangpatihan Village of Ponorogo***

**Ruth Agnesia Sembiring\* & Mayang Agustin**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.

#### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara partisipatif untuk mengurangi pengangguran di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan digunakan peneliti sebagai pisau analisis, yaitu terdiri dari 5 (lima) tahapan: partisipasi pada tahap identifikasi masalah, perumusan program, pelaksanaan program, evaluasi serta menikmati hasil program. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa purna PMI yang pasif karena masih pesimis terhadap hasil dari program pemberdayaan. Partisipasi purna PMI meningkat setelah mereka melihat hasil dari program tersebut dari purna PMI yang telah mandiri melaksanakan bidang usaha. Dari program pemberdayaan tersebut, sebanyak 250 dari 413 purna PMI telah mampu memiliki bidang usaha sendiri. Berdasarkan lima indikator keberhasilan pemberdayaan, hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan purna PMI dapat mengurangi pengangguran yang terjadi pada purna PMI maupun masyarakat sekitar, sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan; ada pengembangan bidang usaha milik purna PMI; rasa kepedulian purna PMI terhadap keluarga miskin di sekitarnya; kemandirian purna PMI, dan juga kemampuan purna PMI dalam memenuhi kebutuhannya.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan; Purna Pekerja Migran Indonesia; Partisipatif.

#### **Abstract**

*This qualitative descriptive research focuses on the participative empowerment of Indonesian former migrant worker to reduce unemployment in Karangpatihan village of Balong sub district in Ponorogo regency of East Java. In this study, people's participation in development is used as the tool of analysis. This research was conducted in five stages: identification of problems, program formulation, program execution, program evaluation, and enjoying the program's outcome. The data was harvested through observations, interviews, and documentations. This study finds that passive participants were found in the initial phase of the program due to their pessimism to the event's outcome. People's participation in this program increased after many of the past participants were successful of becoming independent individuals; 250 people out of 413 are having and running their own business. Based on the five indicators of empowerment success, this study finds that the empowerment of former migrant workers can reduce the number of unemployed people, both former migrant workers and non-migrant workers. The program also helps former migrant workers with their business, increases their awareness to poor families around them, strengthens their independency, and enhances their ability to fulfill their daily needs.*

**Keywords:** Empowerment; Indonesian Former Migrant Worker; Participative.

**How to Cite:** Sembiring, R.A., & Agustin, M., (2023), Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1): 26-40



## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja harus diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan agar dapat mengantisipasi masalah pengangguran. Penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mencapai 870.705 jiwa dan hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah angkatan kerja (BPS, 2020). Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Ponorogo, baik laki-laki maupun perempuan (usia 15-64 tahun) berkisar 68% dari total keseluruhan (BPS, 2019b). Dengan demikian, komponen penduduk yang didominasi usia produktif harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Ponorogo.

Untuk pengembangan wilayah, masalah pengangguran dan masalah kemiskinan; Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah memiliki inisiatif dengan membuat program transmigrasi (Ponorogo, 2018). Harapan Pemerintah Ponorogo melalui inisiatif program tersebut adalah agar penduduk usia produktif memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan di luar daerahnya, dan mendapatkan akses untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Program tersebut juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Regulasi tersebut juga membawa dampak bagi Kabupaten Ponorogo sebagai pemasok Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Jawa Timur. Dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 dan 2019, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 Kabupaten Ponorogo menduduki posisi pertama sebagai pemasok Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Provinsi Jawa Timur (BNP2TKI, n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."

Pada tahun 2019, total penempatan PMI asal Kabupaten Ponorogo adalah sebesar 9.665 kasus. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan dengan tahun 2018 sebelumnya yang berkisar 10.043 kasus (BNP2TKI, 2019). Namun demikian dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah penempatan PMI Asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi.

**Tabel 1. Jumlah Penempatan PMI Asal Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013 s.d 2019**

NO	KAB-KOTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PONOROGO	10.494	8.869	6.443	6.597	9.157	10.043	9.665
2	MALANG	10.218	8.114	3.873	3.348	8.370	8.839	7.928
3	BLITAR	9.880	7.973	5.209	4.815	8.520	9.189	9.154
4	BANYUWANGI	7.957	7.271	4.876	4.039	5.176	6.132	6.343
5	TULUNGAGUNG	7.707	6.723	5.091	4.692	6.173	7.108	7.104
6	MADIUN	6.084	5.185	3.525	3.401	4.689	4.913	4.982
7	KEDIRI	5.433	4.570	2.773	2.426	3.625	4.145	4.027
8	MAGETAN	3.523	3.058	2.268	2.158	2.786	2.989	2.975

Sumber: Olahan Peneliti dari BNP2TKI (Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2018 dan 2019).

Peningkatan jumlah keberangkatan PMI ke luar negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui remitansinya. Remitansi merupakan distribusi dana (uang) yang dikirimkan oleh PMI di luar negeri kepada keluarganya di rumah, atau pun dibawa sendiri oleh PMI ketika kembali ke daerah asal atau negara asal (Afriska et al., 2019). Distribusi dana tersebut sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga PMI di Indonesia.

Jumlah remitansi yang tergolong cukup tinggi, seringkali menyebabkan ketergantungan para PMI dan keluarga PMI. Keluarga PMI menggantungkan hidupnya pada remitansi PMI untuk memenuhi kebutuhan dasar, membayar hutang, membeli tanah, merenovasi atau pun membangun rumah, hingga membeli kendaraan pribadi. Namun keluarga PMI seringkali tidak mampu memanfaatkan remitansi dengan produktif dan sesuai kebutuhan prioritas, sehingga mereka tidak memiliki daya ketika PMI kembali ke tanah air.

Kabupaten Ponorogo sebagai pemasok PMI terbesar di Jawa Timur, nyatanya belum mampu mengatasi masalah pengangguran secara maksimal. Berdasarkan hasil statistik daerah

Kabupaten Ponorogo 2019, jumlah pengangguran meningkat pada tahun 2018 (BPS, 2019a). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 mencapai 3,87%, hal ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya sebesar 3,76%. Walau terjadi peningkatan jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo justru mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu 10,36% dari 11,39% di tahun 2017.

Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Ponorogo tentu berkaitan dengan kepulangan para PMI ke Ponorogo, dimana mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, kepulangan PMI kurang berdampak terhadap kemiskinan karena tingkat kemiskinan Kabupaten Ponorogo justru menurun. Hal tersebut karena remitansi para PMI dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup purna PMI dan keluarga PMI. Namun remitansi dari waktu ke waktu juga dapat habis dipergunakan, maka perlu ada program pemberdayaan terhadap purna PMI untuk membangkitkan kembali potensi mereka agar tetap produktif di daerah asal tanpa harus kembali menjadi pekerja migran di luar negeri. Program pemberdayaan juga dapat memberikan edukasi kepada para purna PMI untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna pemasukan ekonomi keluarga purna PMI.

Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah di kabupaten tersebut yang menjadi lumbung PMI, sekaligus daerah dengan jumlah warga berstatus purna PMI terbanyak. Walau pulang ke daerah asal dengan remitansi, namun para purna PMI di Desa Karangpatihan ini mengalami perubahan di bidang ekonomi akibat pola hidup menjadi konsumtif. Berdasarkan dampak tersebut, purna PMI minim kemampuan untuk mengelola keuangan untuk hal yang produktif. Hal tersebut kemudian menyebabkan harta dan tabungan mereka terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang. Jika hal tersebut terus terjadi, para purna PMI akan kembali pada kondisi semula, yaitu kondisi keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan keresahan tersebut, maka sejak tahun 2014 Pemerintah Desa Karangpatihan berinisiatif merancang program pemberdayaan bagi purna PMI (Ambarwati et al., 2020). Pada program pemberdayaan tersebut dibentuk kelompok usaha yang terdiri dari purna PMI. Pembentukan kelompok usaha dilakukan berdasarkan minat dan bakat masing-masing purna PMI. Kelompok usaha terdiri lebih dari 160 anggota, mereka dibina secara langsung oleh Pusat Latihan Kerja (PLK) di Desa Karangpatihan. Adapun kelompok-kelompok usaha yang dibentuk dalam program tersebut, yaitu: Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Masyarakat (Pokmas), peternak ayam, peternak ikan, peternak sapi, bidang keterampilan hingga produksi makanan olahan. Program pemberdayaan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dilaksanakan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan bidang wirausaha, dan pendampingan terhadap purna PMI. Program pemberdayaan diharapkan mampu mendorong purna PMI untuk berwirausaha dengan menggunakan sumber dayanya agar menjadi mandiri serta mampu memenuhi kehidupan secara berkelanjutan.

Kelompok-kelompok usaha seperti yang disebut di atas, diberdayakan oleh pemerintah setempat melalui Pusat Latihan Kerja (PLK) yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu (Ambarwati et al., 2020): program usaha catering, kerajinan handicraft, dan juga bidang usaha yang terorganisir seperti peternakan ikan, kambing, dan sapi. Untuk mendukung hasil program pemberdayaan tersebut, pemerintah desa juga memberlakukan aturan yaitu mewajibkan kegiatan hajat masyarakat setempat untuk menggunakan jasa catering yang dikelola oleh purna PMI. Demikian pula untuk kegiatan penyambutan tamu kabupaten maupun luar daerah, diharuskan menggunakan lele sebagai menu utama sekaligus sebagai identitas daerah mereka. Lele tersebut dapat mendukung program pemberdayaan purna PMI kelompok usaha peternak ikan. Toko kelontong di desa tersebut tidak diperkenankan untuk memesan dan menerima telur dari desa lain, melainkan dari peternakan masyarakat desa setempat termasuk purna PMI kelompok peternak ayam. Kemudian untuk penjualan hasil ternak kambing, masyarakat desa tersebut tidak diperkenankan untuk menjual kambing kepada desa lain karena hasil ternak kambing digunakan untuk usaha catering di desa tersebut.

Dengan adanya program pemberdayaan yang berhasil menciptakan purna PMI yang mandiri melalui kegiatan wirausaha; hasil program pemberdayaan tersebut juga diharapkan dapat memberdayakan tunagrahita, orang miskin dan pengangguran di desa tersebut melalui kegiatan wirausaha yang dikelola oleh purna PMI. Maka dari itu, seluruh anggota kelompok

usaha purna PMI yang diberdayakan perlu berpartisipasi aktif dan bersinergi dengan pemerintah desa agar program pemberdayaan tersebut mencapai target yang maksimal untuk mengurangi pengangguran.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, maka partisipasi dari komunitas atau kelompok masyarakat yang diberdayakan sangat penting. Partisipasi masyarakat merupakan respon dan wujud komitmen dari masyarakat yang diberdayakan. Menurut Chamber (1995), pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat "*people center development, partisipatory, empowering, and sustainable*" (Mardikanto & Soebiato, 2015). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat mencerminkan pembangunan yang berpusat pada manusia, partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, maka masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan tapi juga sebagai subjek pembangunan; juga menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, purna PMI merupakan subjek yang diberdayakan dan dikatakan sebagai partisipan. Partisipasi purna PMI menjadi syarat utama dalam program pemberdayaan karena program tersebut dilakukan dari, oleh, dan untuk purna PMI.

Conyers (1991) memperinci alasan dari pertanyaan mengapa partisipasi menjadi hal penting dalam program pemberdayaan, yaitu (Maryam, 2015): *pertama* partisipasi merupakan alat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan situasi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat. Jika program pemberdayaan tidak dihadiri oleh masyarakat yang diberdayakan, maka program tersebut terancam gagal. *Kedua* yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan akan meningkat jika masyarakat terlibat sejak perencanaan program hingga evaluasi program. Partisipasi masyarakat pada perencanaan program diperlukan karena masyarakat setempat lebih memahami landasan program tersebut, juga menciptakan "perasaan memiliki" program tersebut dalam diri masyarakat. *Ketiga*, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu hak demokrasi yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat memiliki hak untuk mengutarakan ide, saran, atau masukan dalam program, termasuk hak untuk menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Partisipasi menurut Inu Kencana Syafiie merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi dalam organisasinya. Partisipasi akan mendorong setiap individu untuk berperan dan bertanggung jawab dalam mencapai target organisasi (Syafiie, 2002). Selanjutnya, partisipasi masyarakat menurut Rahardjo merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yaitu pada perencanaan dan implementasi program pembangunan (Adisasmita, 2006). Secara umum partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan. Soetomo memaparkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan bukan hanya karena mobilitas saja, melainkan dilandasi kesadaran dari masyarakat (Soetomo, 2006). Dengan demikian, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan penjelasan konsep partisipasi di atas, maka partisipasi purna PMI dalam program pemberdayaan menjadi suatu hal yang penting. Penelitian mengenai pemberdayaan purna PMI di Desa Karangpatihan sebelumnya (Ambarwati et al., 2020) hanya fokus pada pemberdayaan purna PMI yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dan hasil penelitian tersebut menyatakan keberhasilan program pemberdayaan purna PMI. Sejak tahun 2014 hingga kini, program pemberdayaan purna PMI tersebut dapat memandirikan lebih dari separuh anggotanya. Namun penelitian tersebut tidak menganalisis mengenai bagaimana partisipasi purna PMI dalam program pemberdayaan tersebut. Maka dari itu, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam bagaimana realitas partisipasi purna PMI yang terjadi mulai proses awal program hingga menikmati program. Peneliti juga merasa perlu menganalisis perubahan pola pikir purna PMI, serta menganalisis perkembangan dan keberlanjutan program pemberdayaan melalui kegiatan wirausaha.

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan purna PMI. Penelitian di Desa Celak, Jawa Barat menunjukkan bahwa agar purna PMI berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka diperlukan komunikasi pembangunan sebagai sentral untuk menggerakkan masyarakat Desa Migran Produktif atau Desmigran (Mulyana & Octavianti, n.d.). Penelitian tersebut kurang menjelaskan partisipasi purna PMI sejak tahap inisiasi rencana kegiatan usaha ekonomi secara mandiri; juga partisipasi purna PMI dalam program pembangunan. Penelitian tersebut hanya menjelaskan secara umum partisipasi purna PMI dalam pembangunan Desmigran. Berbeda dengan penelitian ini yang secara lebih detail mendeskripsikan partisipasi purna PMI sejak tahap inisiasi rencana kegiatan usaha ekonomi secara mandiri; juga partisipasi purna PMI dalam program pembangunan desa dan pemberdayaan. Pemberdayaan purna PMI melalui Desa Migran Produktif (Demigrantif) juga dilakukan di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang (Mindarti & Nabil, 2019). Pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian purna PMI dilakukan dengan pengembangan usaha produktif seperti keripik buah dan stik sayur serta pembentukan koperasi/lembaga keuangan untuk memperkuat usaha produktif purna PMI. Berbeda dengan penelitian ini yang bukan hanya membahas pemberdayaan purna PMI untuk meningkatkan perekonomian purna PMI saja, namun juga membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa masyarakat desa melalui usaha produktif milik purna PMI.

Sementara penelitian mengenai pemberdayaan purna PMI lebih difokuskan pada perempuan. Pemberdayaan perempuan purna PMI di Desa Djuru, Kab.Malang berdasarkan komoditas lokal setempat dan kearifan lokal masyarakat (Yuniriyanti et al., 2019). Analisis penelitian tersebut menggunakan konsep pemberdayaan perempuan, konsep kearifan lokal dan konsep ketahanan pangan. Selain perbedaan konsep, penelitian ini bukan hanya fokus pada pemberdayaan perempuan purna PMI saja, melainkan seluruh purna PMI dalam suatu desa. Lalu pemberdayaan mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kab.Wonosobo yang menggunakan prinsip *sustainable development*, dan konsep intervensi komunitas (Arifiartiningih, 2016). Intervensi komunitas dilakukan melalui pendekatan konsensus seperti pengembangan masyarakat lokal; pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial; atau pun pendekatan aksi sosial. Namun penelitian Arifiartiningih tidak membahas partisipasi mantan buruh migran perempuan secara spesifik.

Terdapat pula beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Penelitian Rahman membahas secara umum bahwa pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena tanpa ada partisipasi masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan (Rahman, 2016). Berbeda dengan penelitian ini yang secara spesifik memilih lokasi penelitian untuk menganalisis partisipasi dalam program pemberdayaan. Lalu partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Kebumen, Kab.Tanggamus guna merencanakan program pemberdayaan masyarakat (Maryam, 2015). Partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan di Kelurahan Procot, Kabupaten Tegal untuk pembangunan infrastruktur (Widodo, 2018). Partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kec.Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Mutmainna et al., 2018). Pelaksanaan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat melalui program "Kampung Ramah Anak" di Badran Rukun Warga II Kota Yogyakarta (Rafika Perdana, 2019) dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan (Yasril & Nur, 2018). Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri di Desa Kotabatu, Kab.Bogor (Fitriyanti & Sadono, 2013). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas partisipasi purna PMI dalam suatu program pemberdayaan.

Celah penelitian yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tema pemberdayaan masyarakat lebih banyak fokus pada pelaksanaan atau implementasi, bentuk atau pola pemberdayaan dan juga pengaruhnya. Sementara peneliti fokus menganalisis proses partisipasi purna PMI dalam pembangunan melalui program pemberdayaan dengan menggunakan indikator partisipasi menurut Soetomo, yaitu: partisipasi dalam identifikasi masalah; partisipasi dalam perumusan program; partisipasi dalam pelaksanaan program; partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program; dan partisipasi dalam menikmati hasil program. Selain itu fokus penelitian dan lokasi penelitian di tingkat desa juga menjadi celah

penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Peneliti juga fokus dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan purna PMI dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi sesama purna PMI maupun masyarakat desa melalui bidang usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini. Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dipilih menjadi lokasi yang menjadi objek dalam penelitian. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena Kabupaten Ponorogo merupakan pemasok pekerja migran tertinggi di Jawa Timur. Sementara pemilihan lokasi secara spesifik di Desa Karangpatihan karena desa ini merupakan desa lumbung pekerja migran di Kabupaten Ponorogo. Lebih dari 600 penduduk desa Karangpatihan memutuskan untuk menjadi seorang pekerja migran (Desa Karangpatihan, 2018).

Peneliti mengamati objek yaitu tindakan, kegiatan dan rutinitas purna PMI dalam program pemberdayaan, dan juga fenomena secara langsung yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui pengamatan tersebut peneliti mampu mendeskripsikan sebuah fenomena, realitas dan kegiatan yang ada dalam lingkungan tersebut. Untuk wawancara terstruktur, peneliti mewawancarai stakeholder dan beberapa individu yang sering terlibat aktif dalam pemberdayaan purna PMI di Desa Karangpatihan. Sementara itu, pada wawancara tidak terstruktur, wawancara dilakukan setiap waktu saat terdapat kesempatan di lapangan. Pada wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara menjadi aspek penting agar informasi yang didapatkan oleh peneliti sesuai dengan data yang dibutuhkan dan agar dialog tetap sesuai dengan topik yang diangkat.

Untuk penentuan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan secara sengaja melalui penetapan karakter khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian dapat terjawab oleh informan. Informan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) aparatur Pemerintah Desa Karangpatihan, dan 6 (enam) orang dari purna PMI sekaligus sebagai ketua dan anggota di kelompok usaha yang dibentuk pada program pemberdayaan. Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen, seperti selayang pandang Desa Karangpatihan, dan data-data dari instansi terkait.

Penelitian ini menganalisis data berdasarkan model tahapan analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data yang dilakukan ketika prapenelitian, saat penelitian, hingga akhir penelitian. Pada pengolahan data, peneliti melakukan penggabungan data yang diperoleh menjadi suatu bentuk penjelasan deskriptif atau berbentuk transkrip wawancara. Pada penyajian data, peneliti menempatkan data-data yang telah disaring sesuai dengan pembahasannya. Kemudian tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Selain itu untuk menguji keabsahan dari data yang telah diperoleh, peneliti melakukan validitas data yaitu dengan membandingkan antara data yang dimiliki dengan data-data yang secara langsung terdapat di lapangan. Dalam menguji tingkat keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan perspektif yang digunakan oleh Soetomo dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi Soetomo menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu partisipasi pada tahap identifikasi masalah; perumusan program; pelaksanaan program; evaluasi; serta menikmati hasil program (Soetomo, 2006). Peneliti menilai bahwa kajian yang dikemukakan oleh Soetomo cocok untuk sebagai pisau analisis memperoleh dan mengolah data dari penelitian ini. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Soetomo dapat dipahami dengan pemikiran yang sederhana, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara partisipatif. Pada subbab akhir pembahasan, peneliti menggunakan 5 (lima) indikator keberhasilan program pemberdayaan menurut Sumodiningrat (Mulyawan, 2016) untuk mengetahui keberhasilan program pemberdayaan purna PMI mengurangi pengangguran di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

### **Partisipasi pada Tahap Identifikasi Masalah**

Partisipasi pada tahap identifikasi masalah, bermakna bahwa program pemberdayaan yang dirumuskan harus relevan dengan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat (Soetomo, 2006). Dimensi struktural dan institusional tidak boleh menjadi hambatan bagi purna PMI dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhan yang dirasakannya, maka dari itu perlu komitmen dan kemauan dari pemerintah dan juga masyarakat. Pada penelitian ini, partisipasi purna PMI dalam pemberdayaan diawali dengan musyawarah yang memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan. Identifikasi masalah dilaksanakan dalam rapat musyawarah desa (musdes) pada 2014. Dalam musyawarah tersebut, seluruh tokoh masyarakat mulai dari perangkat desa, lembaga desa seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT) dan para purna PMI diundang ke balai kelurahan. Dengan demikian, masyarakat termasuk purna PMI punya kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan yang mereka alami; dan juga mengutarakan potensi atau sumber daya yang mereka miliki, sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi kunci pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan yang dilakukan.

Pada musdes Karangpatihan, ditemukan beberapa masalah yang menjadi keluhan purna PMI, yaitu: kesulitan dalam memanfaatkan remitensi dengan baik, sehingga banyak jumlah uang yang dibelanjakan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya jangka pendek seperti barang-barang elektronik. Sementara itu, beberapa purna PMI mengeluh karena tidak memiliki penghasilan setelah kembali ke tanah air (Agustin, 2022d). Pasca kepulangan purna PMI dari luar negeri, mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama dua hingga tiga bulan. Namun setelah memasuki bulan keempat, mereka mulai merasakan kesulitan ekonomi. Kondisi ini ditemui pada purna PMI yang menggunakan remitansi untuk membeli tanah atau pun membangun rumah yang tentu membutuhkan dana yang besar. Beberapa purna PMI juga mengeluhkan sulitnya mendirikan usaha karena tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis. Masalah-masalah tersebut diatas menyebabkan purna PMI tidak produktif bahkan menganggur pascakembali dari luar negeri. Kondisi tersebut pula yang mendorong beberapa purna PMI untuk kembali bekerja ke luar negeri. Dengan demikian, peneliti memetakan permasalahan purna PMI Desa Karangpatihan menjadi beberapa point yang berkaitan satu sama lain:

1. Kesulitan dalam memanfaatkan remitansi untuk tujuan jangka panjang
2. Tidak memiliki penghasilan tetap pasca kembali dari luar negeri
3. Minim pengalaman bisnis/bidang usaha
4. Tidak produktif/menganggur
5. Kesulitan ekonomi

Keterbukaan purna PMI dalam menyampaikan keluhan dan masalah-masalah perekonomian pasca kembali dari luar negeri, merupakan bentuk partisipasi dalam mengidentifikasi masalah. Tanpa keterbukaan dari purna PMI, maka program pemberdayaan purna PMI belum tentu mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi purna PMI pascakembali dari luar negeri. Sebab yang lebih memahami masalah-masalah adalah purna PMI sendiri berdasarkan realitas dan pengalaman hidup mereka. Pada musdes, peneliti juga menemukan bahwa kehadiran PKK, LPMD, dan ketua RT tidak menjadi hambatan bagi bagi keterbukaan purna PMI terkait keluhan dan masalah mereka. Musdes yang mengundang dan melibatkan purna PMI juga menunjukkan komitmen kepala desa dan perangkat desa untuk membantu purna PMI menjadi lebih berdaya dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi mereka.

### **Partisipasi pada Perumusan Program Pemberdayaan**

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program menciptakan perasaan “memiliki,” rasa “tanggung jawab” terhadap keberhasilan program dan “motivasi” bagi masyarakat untuk tahapan berikutnya (Soetomo, 2006). Secara umum, program pembangunan masyarakat seperti program pemberdayaan dirumuskan oleh pemerintah. Namun ada pula beberapa program pemberdayaan yang dirumuskan dan dilaksanakan yang dilakukan secara mandiri (*self-help*) oleh individu maupun komunitas dalam masyarakat walau jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, beberapa program pemberdayaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah cenderung kurang mampu

mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan sasaran program pemberdayaan. Akibatnya, beberapa program pemberdayaan tidak menghasilkan dampak positif secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan adalah mutlak diperlukan.

Sebagaimana penjelasan pada bab pendahuluan artikel ini bahwa Pemerintah Desa Karangpatihan merupakan inisiator program pemberdayaan purna PMI. Kendatipun program pemberdayaan purna PMI awalnya diinisiasi oleh pemerintah desa, ada keselarasan pemerintah desa dengan purna PMI dalam perumusan program. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perumusan program pemberdayaan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan purna PMI sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab identifikasi masalah. Wujud partisipasi purna PMI dalam perumusan program pemberdayaan, yaitu memberikan ide atau gagasan dan juga kritik atas program yang telah diinisiasi oleh pemerintah desa. Misalnya, ide atau gagasan yang diberikan purna PMI terkait penggunaan jasa *catering* makanan serba ikan lele untuk menjamu pegawai-pegawai pemerintahan yang datang ke Desa Karangpatihan (Agustin, 2022d). Purna PMI juga meminta solusi kepada inisiator program terkait bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemasaran hasil usaha mereka.

Berdasarkan partisipasi purna PMI dalam perumusan program, maka pemberdayaan purna PMI lebih mengutamakan pelatihan wirausaha, yaitu usaha *catering*; usaha peternakan; dan usaha bidang transportasi (jasa *travel*) (Agustin, 2022d). Purna PMI dibebaskan untuk memilih jenis pelatihan tersebut di atas berdasarkan kemampuan dan minat yang mereka miliki. Untuk mengatasi masalah dalam pemasaran hasil usaha dan masalah dalam pengelolaan keuangan, program pemberdayaan dilengkapi dengan pelatihan pemasaran produk dan pelatihan tata kelola keuangan.

Pada awal perumusan program pemberdayaan pada tahun 2014, ada sekitar 250 purna PMI yang terlibat (Agustin, 2022d). Dua ratus lima puluh purna PMI tersebut terdiri dari purna PMI yang sudah lama pulang ke desa dan purna PMI yang pulang ke desa pada tahun 2014. Sementara purna PMI yang pulang ke desa pada tahun-tahun berikutnya, juga tetap ikut dilibatkan dalam perumusan program yang sesuai dengan kebutuhan dan keluhan purna PMI. Pada dasarnya, perumusan program dilaksanakan setiap kali pelatihan yaitu 3 bulan sekali. Jadi walaupun jadwal kepulangan purna PMI berbeda-beda, purna PMI akan selalu dilibatkan dalam perumusan program, misalnya untuk memberikan kritik, saran, ide baru, atau sekedar menyampaikan kendala yang mereka alami ketika mengikuti program pemberdayaan. Hal ini dilakukan agar purna PMI merasa memiliki program pemberdayaan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan demikian, perumusan program pemberdayaan purna PMI di Desa Karangpatihan ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan purna PMI terkait produktivitas dalam bidang usaha dan kemampuan dalam mengelola keuangan dan memasarkan hasil produksi usaha mereka.

### **Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan**

Menurut Soetomo, partisipasi yang berulang kali dilakukan akan mewujudkan institusionalisasi atau mewujudkan perilaku membangun yang sudah terlembaga dalam diri masyarakat yang diberdayakan (Soetomo, 2006). Selain itu kemandirian masyarakat juga terwujud sebagai akibat dari kebiasaan masyarakat dalam mengelola program pembangunan di daerah mereka. Namun pelaksanaan program pemberdayaan seringkali tidak melibatkan seluruh masyarakat yang diberdayakan, sehingga hal tersebut mempengaruhi tahapan berikutnya yaitu tahap menikmati hasil program yang tidak merata. Maka dari itu, partisipasi purna PMI dalam pelaksanaan program pemberdayaan harus dilihat sebagai sumbangsih purna PMI baik berupa dana, tenaga, maupun barang yang kemudian dapat bermanfaat bagi purna PMI itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, purna PMI juga perlu diorganisir agar mampu menjaga dan memelihara pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini agar manfaat program pemberdayaan dapat dirasakan dan dinikmati dalam jangka panjang atau berkelanjutan.

Berkaitan dengan subbab partisipasi dalam perumusan program, penelitian ini memetakan program pemberdayaan purna PMI melalui tabel di bawah ini. Program pemberdayaan purna PMI selalu melibatkan para tokoh yang ahli dalam bidang usaha yang telah ditentukan, sehingga

purna PMI akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru terkait bidang usaha sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

**Tabel 2. Bentuk Program Pemberdayaan Purna PMI Desa Karangpatihan**

No.	Bidang Usaha	Komponen Terlibat	Bentuk Pelatihan
1.	Ternak kambing	Pemerintah desa, ahli ternak kambing, dan purna PMI	Manajemen kesehatan dan perkembangbiakan Manajemen dan alternative pakan Manajemen kandang dan bibit ternak Prospek pemasaran hasil ternak Strategi pengelolaan keuangan
2.	Budidaya lele	Pemerintah desa, ahli ternak lele, dan purna PMI	Pelatihan pembenihan dan pembesaran Manajemen pakan Manajemen air ikan lele Teknik <i>packaging</i> benih lele Pelatihan olahan berbahan lele Pemasaran hasil budidaya dan hasil olahan Strategi pengelolaan keuangan
3.	Pertanian modern	Pemerintah desa, ahli pertanian, dan purna PMI	Pengolahan kesuburan tanah Pemanfaatan pupuk tanaman Pengolahan hasil pertanian Pemasaran produk
4.	Transportasi/ <i>travel</i>	Pemerintah desa, tokoh ahli, dan purna PMI	Manajemen armada transportasi Pengelolaan arus keuangan
5.	<i>Catering</i>	Pemerintah desa, ahli bidang olah makanan, dan purna PMI	Strategi usaha Strategi pemasaran ( <i>packaging</i> ) Marketing
6.	Kerajinan mebel	Pemerintah desa, tokoh ahli, dan purna PMI	Pelatihan manajemen keuangan Pelatihan standar mutu desain Pemasaran produk Pengembangan usaha

Sumber: Olahan peneliti, 2022.

Dari ke enam bidang usaha di atas, ada beberapa pelatihan bidang usaha dilakukan secara bersama. Misalnya, pelatihan paruh bulan pertama pada minggu ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pelatihan *catering*, mebel, dan transportasi (*travel*) (Agustin, 2022b). Selanjutnya pada minggu ke-3 dan ke-4 dilaksanakan pelatihan usaha petani modern, usaha ternak kambing, dan juga budidaya lele. Begitu juga untuk bulan paruh ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam satu tahun. Dengan kata lain, setiap bidang usaha memiliki jatah pelatihan sebanyak 8 kali dalam setahun.

Program pemberdayaan purna PMI sebenarnya merupakan prioritas ke-2 Pemerintah Desa Karangpatihan setelah program pemberdayaan tunagrahita (Agustin, 2022a). Pemberdayaan purna PMI menjadi prioritas ke-2 tentu karena jumlah purna PMI di desa tersebut dan juga permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Program pemberdayaan diharapkan mendorong perubahan pola pikir purna PMI agar lebih bijaksana mengelola uang untuk tujuan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan purna PMI di Desa Karangpatihan, pernyataan purna PMI berbeda-beda terkait partisipasi mereka dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun poin utamanya cenderung memiliki sudut pandang yang sama, yaitu mereka senantiasa terlibat pada setiap kegiatan pelatihan purna PMI sesuai dengan bidang usaha yang mereka tekuni. Purna PMI di Desa Karangpatihan sudah terlibat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Melalui bidang usaha tersebut, mereka berusaha agar bidang usaha tersebut berhasil dan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan mereka.

Adapun modal yang digunakan untuk membuat bidang usaha berasal dari dana pribadi masing-masing purna PMI, sehingga mereka senantiasa memanfaatkan dana sebaik-baiknya agar tidak rugi. Dari sembilan purna PMI yang menjadi informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa modal awal untuk mendirikan usaha adalah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Rupiah). Berbeda dengan purna PMI yang berkecimpung pada usaha budidaya ikan lele, purna PMI mengeluarkan modal kurang dari Rp. 5000.000,- (lima juta Rupiah) (Agustin, 2022e). Sebagaimana keterangan purna PMI yang sekaligus Ketua Komunitas Pekerja Migran (KOPI) Desa Karangpatihan: "Kalau permodalan ya seperti tadi yang saya ceritakan dek, mereka punya dana sendiri yaitu sisa remitensi mereka, kalau pun tidak punya dana biasanya mereka akan pinjam ke bank" (Agustin, 2022d). Demikian, partisipasi purna PMI dalam pelaksanaan program pemberdayaan juga dilihat dari kemandirian mereka dalam mendirikan usaha dan mengelola keuangan untuk bidang usaha masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sumbangsih purna PMI dalam hal penyediaan dana untuk modal awal bidang usaha, tenaga mereka dalam menjalankan bidang usaha pribadi dan produk usaha mereka merupakan wujud partisipasi dalam program pemberdayaan. Sumbangsih purna PMI tersebut bermanfaat bagi kehidupan mereka dan mewujudkan perilaku membangun yang sudah terlembaga dalam diri purna PMI, dan hal ini sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan menurut Soetomo.

### **Partisipasi dalam Evaluasi Program Pemberdayaan**

Partisipasi dalam evaluasi program menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki dan menyempurkan program-program selanjutnya (Soetomo, 2006). Partisipasi purna PMI tahap ini diawali dengan pemantauan program untuk memperoleh informasi dan juga mengontrol perkembangan program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan. Purna PMI juga dapat memberikan *feedback* dari hasil pemantauan terhadap program, tanggapan purna PMI tentunya berkaitan dengan problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan. Selanjutnya, hal-hal tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi pelaksanaan pemberdayaan agar program pemberdayaan untuk masa yang akan datang berjalan secara lebih maksimal dan lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, evaluasi dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu inisiator pemberdayaan dan purna PMI yang diberdayakan (Agustin, 2022c). Inisiator program pemberdayaan mengawasi perkembangan bidang usaha yang dilakukan oleh purna PMI. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh perangkat desa dan juga para pembantu seperti pelatih pada setiap bidang usaha. Mereka melakukan observasi terhadap perkembangan bidang usaha purna PMI dan juga mencari tahu apabila ada kendala yang dihadapi purna PMI dalam mengembangkan bidang usahanya.

Purna PMI juga mengawasi proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh inisiator pemberdayaan, misalnya dengan memberikan gagasan, kritik, saran maupun menyampaikan kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemberdayaan maupun upaya untuk mengembangkan bidang usaha. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Purna PMI sering merasa tidak puas dengan pelatihan pemasaran produk karena pada praktiknya tidak sesuai dengan materi yang disampaikan (Agustin, 2022d). Pemerintah desa sebenarnya telah membantu pemasaran produk usaha yang dimiliki purna PMI melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun melalui akun social media Desa Karangpatihan. Namun kenyataannya purna PMI menghadapi banyak pesaing di pasar, sehingga purna PMI dituntut untuk meningkatkan kualitas produk usaha agar mampu bersaing dengan produk yang serupa di pasaran. Selain pemasaran produk, hasil evaluasi program pemberdayaan menunjukkan bahwa beberapa purna PMI memiliki kendala terkait waktu untuk ikut pelatihan wirausaha. Hal ini karena beberapa dari mereka memiliki jam kerja yang tidak pasti, sehingga tidak jarang jam kerja mereka bersamaan dengan waktu pelatihan. Ada pula purna PMI yang mengalami kehabisan modal, sehingga purna PMI terpaksa meminjam uang ke bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi oleh inisiator program cenderung ke arah usaha purna PMI, sedangkan evaluasi oleh purna PMI cenderung ke arah pelatihan dan juga menyampaikan kondisi usaha mereka masing-masing. Meskipun evaluasi antar pihak yang memberdayakan dengan pihak yang diberdayakan berbeda, namun maksud dan tujuannya tetap memiliki fokus yang sama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa evaluasi yang dilaksanakan kedua pihak dilakukan secara tidak terjadwal. Artinya, inisiator program pemberdayaan maupun purna PMI kapan pun bisa memberikan kritik dan gagasan mereka, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Karangpatihan berikut ini (Agustin, 2022a): "Oh tentu ada, mereka langsung.

Jadi kalau sarana ini kan berbicara komunikasi ya. Mereka sering kontak kita, ada juga grup wa jadi sewaktu-waktu mereka bisa menyampaikan control mereka untuk kemudian kita jadikan evaluasi untuk kedepannya." Berdasarkan hasil wawancara tersebut, evaluasi berupa kontrol atau pengawasan dari purna PMI dapat dilaksanakan melalui komunikasi digital seperti *whatsapp group*. Purna PMI dan inisiator pemberdayaan juga dapat memberikan kritik masukan satu sama lain pada saat pertemuan rutin tiga bulan sekali (Agustin, 2022b).

### **Partisipasi dalam Menikmati Hasil Program Pemberdayaan**

Pada dasarnya pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup atau kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Soetomo, 2006). Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangat penting karena keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat seberapa banyak purna PMI dapat merasakan manfaat dari pemberdayaan. Apabila pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan berjalan sesuai dengan harapan purna PMI, maka hal ini dapat mendorong keinginan dan kesukarelaan purna PMI untuk terus berpartisipasi dalam program pemberdayaan selanjutnya.

Dengan program pemberdayaan, beberapa purna PMI yang awalnya tidak memiliki pekerjaan setelah pulang dari luar negeri, sekarang mampu mendirikan usaha sendiri, sehingga mereka memiliki penghasilan tetap. Produk yang dihasilkan bidang usaha purna PMI cukup beragam, sehingga pemerintah desa berharap agar hasil dari bidang usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan purna PMI secara khusus dan masyarakat desa secara umum. Masing-masing bidang usaha yang dikembangkan oleh purna PMI tentu menghasilkan produk yang berbeda-beda. Misalnya produk usaha ternak kambing domba maupun kambing jawa: peranakan kambing untuk dijual dan kambing untuk disembelih. Produk usaha budidaya ikan lele: benih lele untuk dijual; lele untuk dijual; dan keripik kulit ikan lele. Produk pertanian modern: singkong untuk dijual; tepung mokaf yang berbahan baku singkong. Produk usaha mebel: kursi *cafe*, *kitchen set*, hingga beberapa hasil produk sesuai keinginan pelanggan.

Sejauh ini, purna PMI telah menikmati hasil program pemberdayaan. Misalnya program pemberdayaan purna PMI dalam bidang usaha pertanian modern, dimana purna PMI dilatih untuk mengelola hasil produksi sawah mereka dengan lebih modern dan lebih bernilai jual tinggi. Sawah biasanya ditanami ketela dan harga panen ketela Rp. 7000,- per kilogram. Namun dengan pelatihan pertanian modern, purna PMI mampu mengolah ketela menjadi tepung mokaf yang bernilai jual lebih tinggi, yaitu Rp. 15.000,- per kilogram (Agustin, 2022c). Dengan demikian, penghasilan petani ketela cenderung meningkat dari yang biasa hanya Rp. 700.000,- sekali panen menjadi hingga Rp. 2000.000,- sekali panen.

Pada bidang usaha *catering*, purna PMI mendapatkan pelanggan dari warga desa sekitar bahkan dari luar desa. Program pemberdayaan melalui pelatihan *catering*, purna PMI didorong untuk meningkatkan kreatifitas agar menghasilkan produk makanan atau jajanan yang lebih menarik minat pelanggan dan dapat bersaing di pasar. Selain itu, untuk mendukung usaha-usaha milik purna PMI di Desa Karangpatihan, pemerintah desa mengeluarkan suatu aturan yaitu setiap kegiatan hajatan yang membutuhkan sajian harus mengambil dari produk usaha di Desa Karangpatihan (Agustin, 2022d). Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap pendapatan ekonomi para purna PMI yang memiliki usaha *catering*. Sementara bidang usaha transportasi, hasil dari pemberdayaan yang didapatkan oleh purna PMI berupa relasi, dimana dengan kemampuan purna PMI mengembangkan relasi dengan banyak pihak akan memudahkan mereka untuk mendapatkan penumpang *travel* hingga sewa kendaraan.

Dari seluruh produk bidang usaha yang dimiliki oleh purna PMI, tentu mengarah pada poin ekonomi. Di mana dengan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing bidang usaha dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup purna PMI. Hasil penelitian ini menemukan bahwa purna PMI ikut berpartisipasi dalam menikmati hasil program pemberdayaan. Hasil program pemberdayaan yang sesuai harapan purna PMI tentu dapat meningkatkan jumlah purna PMI yang berpartisipasi dalam program tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soetomo bahwa jika pemanfaatan hasil pemberdayaan berjalan sesuai dengan masyarakat, maka masyarakat semakin ingin dan sukarela untuk terus berpartisipasi dalam program pemberdayaan selanjutnya. Berdasarkan penjelasan dari Ketua KOPI (KOMunitas Pekerja

Imigran) Desa Karangpatihan, dari 620 purna PMI yang tersebar di Desa Karangpatihan terdapat 413 purna PMI yang terlibat aktif dalam program pemberdayaan tersebut (Agustin, 2022d). Sejumlah kurang lebih 250 purna PMI telah memiliki usaha secara mandiri. Sementara itu sisanya ada yang kerja serabutan dan ada pula yang bekerja sebagai tenaga kerja di bidang usaha milik purna PMI. Dengan demikian, pertimbangan hasil program pemberdayaan dapat merubah kehidupan mereka dan juga menjadi poin untuk menarik purna PMI terus berpartisipasi dalam pemberdayaan.

### **Pemberdayaan Purna PMI secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran**

Untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan purna PMI dapat mengurangi pengangguran di Desa Karangpatihan, penelitian ini menggunakan 5 poin penting keberhasilan pemberdayaan menurut Sumodiningrat (Mulyawan, 2016). *Pertama*, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Program pemberdayaan masyarakat di suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Desa Karangpatihan cukup tinggi. Jenis kemiskinan di desa ini merupakan kemiskinan natural, dimana mayoritas penduduk miskin merupakan tunagrahita. Secara umum kemiskinan di desa ini terjadi karena penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab partisipasi dalam identifikasi masalah, bahwa purna PMI juga tidak produktif atau menganggur se usai kembali ke desa, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan purna PMI ternyata memberikan pengaruh positif terhadap kedua persoalan kemiskinan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Desa Karangpatihan (Agustin, 2022a):

“Tentu sangat berpengaruh ya, karena dari keseluruhan penduduk desa sekitar enam ribuan jiwa penduduk tingkat pengangguran juga lumayan banyak. Tapi karena sudah banyak yang memiliki usaha sendiri jadi mereka juga membuka lapangan kerja baru artinya juga membantu penyerapan tenaga kerja. Cuma untuk data angkanya kami belum sempat mendatanya, kalau secara kasat mata saya melihat pengangguran sudah menipis ya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberdayaan ikut memberikan pengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Di mana, purna PMI yang memiliki bidang usaha mampu membantu penyerapan tenaga kerja yang ada di Desa Karangpatihan. Penelitian ini belum mendapatkan data konkret mengenai berapa jumlah penduduk miskin sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan purna PMI di Desa Karangpatihan. Namun demikian, penelitian ini berhasil menemukan data mengenai jumlah purna PMI yang memiliki masing-masing bidang usaha. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha ternak kambing adalah 56 orang (Agustin, 2022d). Jumlah purna PMI dalam bidang usaha ternak lele adalah 52 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha ternak sapi adalah 8 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha olahan makanan/*catering* adalah 38 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha pertanian modern adalah 53 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha kerajinan mebel adalah 16 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha jasa transportasi adalah 11 orang. Jumlah purna PMI dalam bidang usaha bengkel las adalah 11 orang.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua KOPI Desa Karangpatihan, bidang usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah dalam bidang usaha makanan/*catering* (Agustin, 2022d). Kemudian di susul oleh bidang usaha pertanian modern dan bidang usaha kerajinan mebel. Tenaga kerja yang diambil untuk bidang usaha tersebut adalah para purna PMI maupun masyarakat sekitar yang memiliki kemampuan bidang kerajinan (tukang) kayu dan juga buruh tani.

*Kedua*, perkembangan usaha untuk peningkatan pendapatan. Program pemberdayaan akan dinilai berhasil jika sasaran program dapat mengalami perkembangan usaha, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang meningkat. Hasil penelitiann ini menemukan bahwa pemberdayaan purna PMI melalui pelatihan wirausaha telah mendorong purna PMI mengembangkan bidang usahanya. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan dari salah satu purna PMI yang memiliki usaha jasa transportasi:

“Jelas mba, karena misalnya saya sendiri itu dulu cuma punya satu kendaraan saja untuk carteran, tapi dengan pelatihan manajemen keuangan itu sekarang saya punya empat kendaraan

untuk usaha transportasi saya. Kalau temen-temen TKI yang lain saya kira juga seperti itu, banyak sekali usaha mereka yang terus berkembang lebih besar.”

*Ketiga*, kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungan. Dengan adanya pemberdayaan purna PMI, selain roda perekonomian purna PMI mampu berjalan dengan baik, ternyata juga berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan keluarga yang kurang mampu di lingkungan mereka. Menurut kepala desa, purna PMI membantu keluarga miskin di lingkungan dalam bentuk bantuan sembako maupun uang (Agustin, 2022a). Juga ada purna PMI yang setiap hari memberikan makanan kepada para keluarga miskin tunagrahita. Selain bantuan yang bersifat mandiri, purna PMI melalui KOPI Desa Karangpatihan juga berinisiatif untuk menggalang dana yang kemudian disalurkan kepada saudara-saudara mereka yang kurang mampu khususnya di Desa Karangpatihan (Agustin, 2022c).

*Keempat*, adalah peningkatan kemandirian. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab partisipasi dalam menikmati hasil program bahwa terdapat beberapa purna PMI yang berhasil melakukan usahanya secara mandiri. Dengan kata lain, mereka telah mampu menjalankan usaha tanpa harus bergantung kepada inisiator program. Namun masih ada beberapa purna PMI yang masih enggan berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut. Sementara itu, dampak positifnya adalah mereka yang berhasil mandiri mampu memberikan contoh dan juga motivasi terhadap teman-teman purna PMI yang lain untuk terus berkembang.

*Kelima* adalah peningkatan pendapatan keluarga. Peningkatan pendapatan berlaku untuk seluruh purna PMI yang ikut dalam program pemberdayaan. Sebagaimana penjelasan pada subbab sebelumnya, melalui program pemberdayaan purna PMI berhasil mengembangkan usaha mereka dan berpengaruh besar terhadap pendapatan sehari-hari. Dengan perkembangan usaha milik purna PMI, mereka membutuhkan tenaga kerja yang direkrut dari sesama purna PMI. Purna PMI yang tidak punya penghasilan tetap usai kembali ke desa menjadi punya penghasilan tetap.

## **SIMPULAN**

Kabupaten Ponorogo sebagai daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan program yang tepat untuk pemberdayaan PMI yang telah kembali. Pemberdayaan purna PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah juga sangat berperan dalam pemberdayaan purna PMI. Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur merupakan salah satu desa penyumbang PMI yang berinisiatif secara mandiri memberdayakan purna PMI yang ada di desanya.

Partisipasi purna PMI dalam program pemberdayaan dimulai dari identifikasi masalah; perumusan program pemberdayaan; pelaksanaan program pemberdayaan; evaluasi program pemberdayaan; dan menikmati hasil program pemberdayaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi purna PMI dalam program pemberdayaan di Desa Karangpatihan dapat dikatakan baik. Meskipun pada awal pelaksanaan program pemberdayaan terdapat beberapa purna PMI yang pasif. Hal tersebut karena beberapa purna PMI masih belum bersifat terbuka terhadap upaya pemerintah desa dan beberapa purna PMI cenderung pesimis terhadap hasil dari program pemberdayaan. Purna PMI tergerak dan memiliki minat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan setelah mereka melihat hasil dari program tersebut dari purna PMI yang telah mandiri melaksanakan bidang usaha. Program pemberdayaan purna PMI mampu memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian purna PMI dari yang awalnya tidak memiliki penghasilan tetap, tidak produktif/menganggur dan hanya menggantungkan hidup pada remitensi. Melalui program pemberdayaan, purna PMI memiliki bidang usaha dan memiliki pendapatan, sehingga kehidupan ekonomi mereka terpenuhi.

Program pemberdayaan purna PMI juga mampu mengurangi pengangguran di Desa Karangpatihan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan di desa tersebut. Program pemberdayaan purna PMI telah mampu mendorong 250 purna PMI memiliki bidang usaha secara mandiri, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Desa Karangpatihan. Hal ini karena purna PMI pemilik bidang usaha tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi sesama purna PMI dan masyarakat desa yang memiliki keterampilan tertentu. Program pemberdayaan purna PMI telah meningkatkan pendapatan ekonomi purna PMI melalui

hasil produksi bidang usaha masing-masing. Dengan pendapatan ekonomi yang meningkat, purna PMI semakin peduli terhadap keluarga miskin di sekitarnya. Kepedulian purna PMI terhadap keluarga miskin sekitarnya adalah dengan memberikan bantuan sembako, bantuan berbentuk uang tunai, bantuan makanan sehari-hari hingga penggalangan dana untuk membantu tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan data, khususnya mengenai jumlah pengangguran sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan purna PMI. Dengan demikian, penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah Desa Karangpatihan maupun dinas terkait di bawah Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar lebih memperbaharui sistem pendataan purna PMI dan jumlah pengangguran, sehingga dapat diketahui peningkatan maupun penurunan dari jumlah purna PMI dan jumlah pengangguran. Penelitian ini juga memberikan saran kepada peneliti yang hendak mengkaji pemberdayaan purna PMI agar lebih mengkaji keterlibatan pihak swasta/korporat dalam memberdayakan purna PMI pada suatu daerah di Indonesia.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah mendukung dan mendanai penelitian ini, hingga menghasilkan artikel karya ilmiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 231–248. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>
- Agustin, M. (2022a). *Hasil Wawancara dengan EM (Kepala Desa Karangpatihan)*.
- Agustin, M. (2022b). *Hasil Wawancara dengan MW (Kaur Kesejahteraan Desa Karangpatihan)*.
- Agustin, M. (2022c). *Hasil Wawancara dengan P (Purna PMI dalam bidang usaha pertanian modern)*.
- Agustin, M. (2022d). *Hasil Wawancara dengan S (purna PMI & Ketua Kominitas Pekerja Migran)*.
- Agustin, M. (2022e). *Hasil Wawancara dengan S (Purna PMI dalam usaha budidaya lele)*.
- Ambarwati, E., Wahjuni DJ, E., & Lestari, N. (2020). Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 12–32. <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.9>
- Arifiartiningih. (2016). Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. *Sosiologi Reflektif*, 11(1), 109–138.
- BNP2TKI. (n.d.). *DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2018*. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)
- BNP2TKI. (2019). *DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TAHUN 2019*. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf)
- BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020*. <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2020/03/18/265/jumlah-penduduk-kabupaten-ponorogo-tahun-2016-2020.html>
- BPS, K. P. (2019a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2019*. <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2019/12/31/e88fd9f5e11e8cda9817bd44/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-ponorogo-2019.html>
- BPS, K. P. (2019b). *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2019*. <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2019/12/31/f457b30254e19c9e83558ff4/statistik-daerah-kabupaten-ponorogo-2019.html>
- Desa Karangpatihan. (2018). *Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. <https://www.karangpatihan.com/>
- Fitriyanti, N., & Sadono, D. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Di Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan*, 9(1), 80–87. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v9i1.9860>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.

- Maryam, D. (2015). Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, X(1).
- Mindarti, L. I., & Nabil, P. (2019). PEMBERDAYAAN MANTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PROGRAM DESMIGRATIF (Studi di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang). *PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH*.
- Mulyana, S., & Octavianti, M. (n.d.). Komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan purna pekerja migran. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VIII(2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1266>
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. UNPAD Press.
- Mutmainna, Burhanuddin, & Haq, N. (2018). PARTISIPASI GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 83-98.
- Ponorogo, D. (2018). *Program Transmigrasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan*. <https://disnaker.ponorogo.go.id/2018/03/20/program-transmigrasi-upaya-peningkatan-kesejahteraan/>
- Rafika Perdana, F. (2019). Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(1), 161-188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-08>
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189-199.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strartegi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Widodo, F. (2018). Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108-121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>
- Yuniriyanti, E., Nurdewanto, B., & Sudarwati, R. (2019). Pemberdayaan Perempuan Desa Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 3(1), 1708-1719.